

**FENOMENA PENYULUH PERTANIAN BERALIH PROFESI
(Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan)**

Oleh

FEBRIYANTI NURSYAMSIAH



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

PALEMBANG

2019

**FENOMENA PENYULUH PERTANIAN BERALIH PROFESI
(Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Libatkan Tuhan disemua urusanmu, pantang menyerah, jadi diri sendiri dan beranilah keluar dari zona nyaman kalahkan ketakutan".

Dengan Rahmat Allah SWT, Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Kedua orang tuaku tercinta : Bapak (Sunardi), ibuku (Nanik Sumarni) dan Adikku Arif Mukhlisin yang selalu memberiku semangat mental dan rohani, rela meneteskan keringat demi masa depanku serta bermunajat do'a mustajabah untuk mbak dalam setiap langkah untuk menyelesaikan studi.*
- ❖ *Terima kasih yang selalu menemani, membantu support materi dan waktu hingga telat wisudamu.*
- ❖ *Terima kasih kepada kawan kos-kosan yang telah menemani hari-hariku dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi (Mbak nopa, restu, menik, nopi)*
- ❖ *Sahabat seperjuanganku Agribisnis2014 terima kasih atas waktu dan dukungannya selama ini (Nila, nobi,, ayu, riana, audina, ana)*
- ❖ *Seluruh keluargaku di Pramuka (narli, yepika, yuni, ema, bolot, sulek, arif, aman, lukman, yunan yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk tetap optimis.*
- ❖ *Terimakasih untuk teman-teman agribisnis 2014 kelas A,B,C dan untuk adik-adikku 2015,2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
- ❖ *Hijaunya Almamaterku*

RINGKASAN

FEBRIYANTI NURSYAMSIAH “Fenomena Penyuluh Pertanian Beralih Profesi (Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”.(dibimbing oleh **KHAIDIR SOBRI** dan **Harniatun Iswarini**).

Penelitian ini dilaksanakan untuk Untuk mengetahui alasan penyuluh pertanian beralih profesi di wilayah kabupaten Banyuasin dan Untuk mengetahui dampak alih profesi Penyuluh Pertanian terhadap aktifitas penyuluhan pertanian di wilayah kabupaten banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case Studi*). Metode penarikan contoh yang digunakan yaitu *Purposive sampling*, sensus (*sampling total*), *accidental sampling*, dimana yang menjadi sampelnya adalah informan kunci(Bupati, Sekda, Pimpinan DPRD, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Bidang Pertanian di Banyuasin. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya serta data-data yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengolahan data dan analisis data yang digunakan dengan cara *editing*, *coding* dan *tabulating* selanjutnya dilakukan analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari penyuluh pertanian beralih profesi adalah kebosanan, tantangan yang lebih luas (permintaan atasan), pengembangan karier ke depan, adanya regulasi yang menanungi sehingga munculah peluang (kesempatan) dan pemekaran suatu wilayah (kabupaten baru). Dampak yang terjadi dari banyaknya penyuluh yang beralih profesi dapat dilihat dari dampak positif dan negatif. Dampak positif dari alih profesi adalah terbukalah alih profesi penyuluh pertanian. Sehingga terciptalah peluang, peluang terbuka karena kemampuan melloby atasan dan prestasi yang ditorehkan. Dampak Negatifnya yaitu karena banyaknya penyuluh pertanian yang beralih profesi menyebabkan minimnya jumlah penyuluh pertanian sehingga aktifitas penyuluhan tidak seperti biasanya

SUMMARY

FEBRIYANTI NURSYAMSI AH "The Phenomenon of Agricultural Extension Switches Profession (Case Studi in Banyuasin District of South Sumatra Province)" (guided by **KHAIDIR SOBRI** and **Harniatun Iswarini**).

This research was conducted to find out the reasons for agricultural extension workers to switch professions in the Banyuasin district and to find out the impact of the Agricultural Extension profession on agricultural extension activities in the Banyuasin district of South Sumatra Province. This research was conducted in the Banyuasin Regency of South Sumatra Province in August to October 2018. The research method used was a case Studi. The sampling method used is purposive sampling, census (total sampling), accidental sampling, where the sample is key informants (Regent, Regional Secretary, DPRD Leader, Head of Agriculture Service and Head of Agriculture in Banyuasin. Data collection methods used in research are observations and direct interviews with respondents using a list of questions that have been prepared in advance as well as data obtained from related institutions related to this research. Data processing methods and data analysis used by editing, coding and tabulation are then carried out. data analysis with a qualitative descriptive approach.

The results of the study show that the reasons underlying the extension of agricultural professions are boredom, broader challenges (request of superiors), career development in the future, the existence of regulations that protect so that opportunities arise (opportunities) and expansion of a region (new district). The impact of the many extension workers who switch professions can be seen from the positive and negative impacts. The positive impact of transferring professions is the opening of the agricultural extension profession. So that opportunities are created, opportunities are open because of the ability of superiors melloby and achievements that are inscribed. The negative impact is due to the large number of agricultural extension workers who have changed professions which have caused a minimum number of agricultural extension workers so that extension activities are not as usual.

**FENOMENA PENYULUH PERTANIAN BERALIH PROFESI
(Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan)**

**Oleh
Febriyanti Nur Syamsiah**

**SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pertanian**

**Pada
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

PALEMBANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**FENOMENA PENYULUH PERTANIAN BERALIH PROFESI
(Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan)**

Oleh

FEBRIYANTI NUR SYAMSIAH

412014003

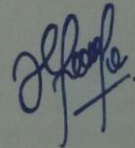
Telah dipertahankan pada ujian 5 Maret 2019

Pembimbing Utama,



Ir. Khaidir Sobri, MP

Pembimbing Pendamping,



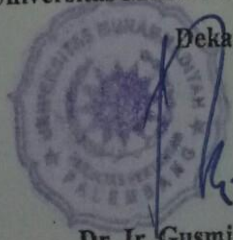
Harniatun Iswarini, SP, M.Si

Palembang, 19 Maret 2019

Fakultas Pertanian

Universitas Muhammadiyah Palembang

Dekan,



Dr. Ir. Gusmiatun, M.P.

NBM/NIDN. 727236/0016086901

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriyanti Nursyamsiah
Tempat /Tanggal Lahir : Bandarjaya / 14 Februari 1996
NIM : 412014003
Program Studi : Agribisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah atau skripsi saya dalah asli hasil tulisan yang disusun dan bukan merupakan hasil dari plagiarisme. Apabila dikemudian hari diketahui adanya ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan atau mempublikasikannya di media secara *Fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama masih tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 26 Februari 2019



(Febriyanti Nursyamsiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” **Fenomena Penyuluh Pertanian Beralih Profesi (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan**” yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan penulis mengucapkan terima kasih Bapak **Ir. Khaidir Sobri, M.P.** selaku dosen pembimbing utama dan Ibu **Harniatun Iswarini S.P., M.Si** selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan yang menunjang dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu baik berupa do’a, saran serta masukan dalam pembuatan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik kita. Amin

Palembang, 05 Maret 2019

Penulis,

RIWAYAT HIDUP

FEBRIYANTI NURSYAMSIAH dilahirkan di Bandarjaya pada tanggal 14 Februari 1996, merupakan anak pertama dari Bapak Sunardi dan Ibu Nanik Sumarni.

Pendidikan Sekolah Dasar telah diselesaikan Tahun 2007 di SDN Bandarjaya, Sekolah Menengah Pertama Tahun 2010 di SMP Negeri 01 Bandarjaya, Sekolah Menengah Atas Tahun 2013 di SMA Negeri 01 Air Sugihan Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2014 Program Studi Agribisnis.

Pada Bulan Agustus 2017 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XLVIII di Desa Fajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2018 penulis melaksanakan penelitian tentang Fenomena Penyuluh Pertanian Beralih Profesi (Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	x
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
BAB II. KERANGKA TEORITIS.....	10
A. Penelitian Terdahulu yang Sejenis.....	15
B. Tinjauan Pustaka	15
1. Konsepsi Otonomi Daerah... ..	18
2. Konsepsi Revitalisasi Penyuluhan Pertanian	21
3. Konsepsi Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dan Tata	
4. Cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	
Fungsional	23
5. Konsepsi Alih Profesi	25
6. Konsepsi Penyuluhan dan Penguasaan Penyuluhan	
Pertanian.....	27
7. Konsepsi Perspektif Penyuluhan Sekarang Dan Akan	
Datang	37
C. Model Pendekatan.....	40
D. Batasan Penelitian dan Operasional Variabel	41
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Tempat dan Waktu.....	43
B. Metode Penelitian	44
C. Metode Penarikan Contoh	44
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Keadaan Umum Daerah Penelitian.....	48
1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	48
2. Keadaan Topografi	49
3. Pemerintahan	50
4. Jumlah Penduduk dan Ketenagakerjaan	53
5. Sarana dan Prasarana	55

	Halaman
B. Identitas Responden	55
1. Identitas Informan Kunci	57
2. Identitas Penyuluh Pertanian Aktif	58
3. Identitas Penyuluh Pertanian Alih Profesi	60
4. Identitas Petani.....	62
C. Alasan Penyuluh Pertanian Beralih Profesi di wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	63
1. Hasil wawancara dengan informan kunci	65
2. Hasil wawancara dengan penyuluh pengembangan karier .	69
3. Hasil wawancara dengan penyuluh alih profesi	73
2. Pembahasan	76
1. Otonomi daerah	77
2. Manajemen pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional	79
3. Alih Profesi	80
D. Hasil dan Pembahasan dampak alih profesi penyuluh pertanian terhadap aktifitas penyuluhan pertanian di wilayah kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan	83
1. Hasil wawancara dengan penyuluh aktif	84
2. Hasil wawancara dengan petani.....	87
3. Pembahasan	89
4. Aktifitas Penyuluhan Pertanian	89
5. Dampak alih profesi.....	91
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Rekapitulasi database kelembagaan tani dan penyuluhan badan pelaksanaan penyuluhan, pertanian, perikanan, dan kehutanan (bp4k) kabupaten banyuasin desember 2016.....	5
2. Penelitian Terdahulu yang Sejenis.....	15
3. Jumlah Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyuasin, 2017.....	48
4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dirinci Menurut Unit Kerja, Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin, 2016.....	50
5. Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Banyuasin, 2016.....	53
6. Jumlah Perusahaan dan Karyawan Menurut Bidang Usaha di Kabupaten Banyuasin, 2016.....	54
7. Jumlah Sekolah Negeri Dan Sekolah Swasta Di Kabupaten Banyuasin, 2016.....	55
8. Jumlah kantor camat, kantor lurah, dan kantor desa di kabupaten banyuasin, 2016.	56
9. Data Identitas Informan Kunci di Kabupaten Banyuasin.	57
10. Data Identitas Penyuluh Pertanian Aktif.....	58
11. Jumlah responden penyuluh pertanian aktif beserta umur dari berbagai kecamatan di kabupaten banyuasin	59
12. Identitas Penyuluh Pertanian Alih Profesi dengan kelompok umur Sebagai Responden di Kabupaten Banyuasin.	60
13. Tingkat Pendidikan Penyuluh Pertanian yang Beralih Profesi di Kabupaten Banyuasin.	61
14. Tahun Alih Profesi Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Banyuasin.....	62

	Halaman
15. Jumlah dan data responden petani yang dipilih di kabupaten banyuasin	63
16. Jumlah Responden Penyuluh Pertanian yang Beralih Profesi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyuasin.	64
17. Tentang pemberian sikap informan kunci terhadap alih profesi penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuasin.....	68
18. Tentang Alasan Penyuluh Pertanian Beralih Jabatan Di Wilayah Kabupaten Banyuasin	73
19. Tentang Alasan Penyuluh Pertanian Beralih Profesi di Wilayah Kabupaten Banyuasin	76
20. Tentang Dampak yang Terjadi Pada Penyuluh Aktif Terhadap Alih Profesi Penyuluh Pertanian	86
21. Tentang Dampak yang Terjadi Pada Petani Terhadap Alih Profesi Penyuluh Pertanian	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Diagramatik Fenomena Penyuluh Pertanian Beralih Profesi Study Kasus Di Wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Peta Wilayah Kabupaten Banyuasin.	98
2. Profil Penyuluh Pertanian Aktif Di Kabupaten Banyuasin, 2018.	99
3. Identitas Responden Penyuluh yang Beralih Profesi, 2018.	102
4. Hasil Wawancara Penyuluh Pertanian yang Beralih Profesi Bulan Agustus 2018-Oktober 2018 Tentang Alasan Penyuluh Pertanian Beralih Profesi Di Wilayah Kabupaten Banyuasin, 2018.....	103
5. Hasil Wawancara Penyuluh Aktif Bulan Agustus 2018- Oktober 2018 Tentang Dampak Alih Profesi Penyuluh Pertanian Terhadap Aktifitas Penyuluhan Pertanian Di Wilayah Kabupaten Banyuasin, 2018.....	111
6. Hasil Wawancara Petani Bulan September 2018 Tentang Dampak Alih Profesi Penyuluh Pertanian Terhadap Aktifitas Penyuluhan Pertanian Di Wilayah Kabupaten Banyuasin, 2018.....	113
7. Dokumentasi Penelitian	114
Surat Keterangan	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan dan misi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya pembangunan pertanian ini harus dapat membawa misi pemerataan agar dapat mengentaskan kemiskinan dan menyokong ketahanan pangan Indonesia. Dimensi baru dalam pembangunan pertanian dapat berupa pertumbuhan pertanian, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan hidup (Andriyanto, Tuhana Taufik, 2014). Selanjutnya hal ini sejalan dengan Sukino (2013) bahwa Pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada didalamnya, apabila sumber daya manusia memiliki motivasi tinggi, kreativitas dan mampu mengembangkan inovasi, maka pembangunan pertanian dapat dipastikan semakin baik.

Lebih lanjut Sukino (2013), dengan demikian peningkatan sumber daya manusia merupakan kunci sukses, karena pada dasarnya apapun bentuk pembangunan, manusia merupakan pelaku dari kegiatan tersebut. Untuk itu apabila pelaku pembangunan mempunyai sumber daya yang rendah tentu sangat berpengaruh terhadap hasil pembangunan yang dilakukan. Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kreativitas dan meningkatkan teknologi terutama kapasitas pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Oleh karena itu perlu adanya pengupayaan pemberdayaan petani untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan salah satunya melalui penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian adalah sebagai proses pembelajaran (pendidikan non formal) yang diberikan untuk petani dan keluarganya memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dalam pembangunan di bidang pertanian. Penyuluh Pertanian mempunyai tugas penting untuk mendorong petani belajar, tetapi untuk

penyuluh sendiri harus gigih belajar dari pengalaman, mendengarkan para petani, melakukan pendekatan-pendekatan baru, melakukan pengamatan dan menanalisis langkah-langkah tersebut lebih cermat. Tidak jarang penyuluh dihadapkan pada keharusan memberi informasi saja demi kepentingan petani sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian, dari penyuluh diinginkan kemampuannya untuk mendorong petani belajar sekaligus melakukan perubahan perilaku tanpa mengabaikan etika dan akibat moral dari tindakan-tindaknya yang menyiratkan bahwasanya agen penyuluhan bebas melayani kebutuhan petani dengan menggunakan cara-cara yang dianggap paling efektif untuk membawa perubahan yang signifikan, Van Den Ban dan Hawkins (1999).

Selanjutnya Anang (1995), penyuluhan pertanian mula-mulanya berawal dari upaya untuk meningkatkan produksi pertanian baik untuk kepentingan petani maupun untuk kepentingan pemerintah dalam menuju swasembada pangan. Yang dalam perkembangannya penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami pasang surut karena dengan keadaan dan kondisi situasi politik serta ekonomi bangsa yang terus berkembang. Aktivitas Penyuluh Pertanian pada masa revolusi fisik inilah tahun 1945-1950, usaha-usaha yang ditempuh oleh pemerintah adalah menemukan sistem penyuluhan yang tepat, yang dapat lebih menjamin secara kuantitatif peningkatan produksi komoditas pertanian tanaman pangan terutama beras dalam waktu yang singkat.

Lebih lanjut Slamet (2001), menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu lembaga pelatihan bertugas menyusun sistem pelatihan bagi penyuluh, melatih para penyuluh untuk meningkatkan kompetensi tertentu dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas lapangan sehari-hari. Pendekatan penyuluhan yang dilaksanakan pada masa Bimbingan Masyarakat (BIMAS), Intensifikasi Khusus (INSUS) dan SUPRA INSUS adalah melalui Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU).

Selanjutnya Anang (1995), LAKU merupakan sistem partisipatif dengan mengkombinasikan sistem instruktif dan sistem persuasif, dimana Penyuluh

Pertanian Lapangan (PPL) memberikan informasi kepada para petani dan kemudian petani mencari informasi kepada Penyuluh Pertanian. Lebih lanjut, sistem kerja LAKU merupakan program rekayasa sosial yang bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyebaran teknologi kepada petani melalui sistem pembinaan kelompok tani, dengan pembinaan kelompok tani yang baik akan meningkatkan kekompakan para petani anggota kelompok dengan melalui perubahan sikapnya. Slamet (2001), dengan demikian sistem kerja LAKU melakukan kegiatan latihan di BPP yang dibimbing oleh Penyuluh Pertanian Madya (PPM) dan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS). Sistem kerja atau pendekatan penyuluhan LAKU semakin kurang efektif karena banyak didasarkan kepada perencanaan yang “*top down*” dan kurang menunjang pengembangan usahatani yang berwawasan agribisnis. Latihan dalam pola LAKU juga semakin berkurang karena informasi baru yang dilatihkan kepada petani semakin berkurang. Selanjutnya munculah UU Nomor 32 tahun 2004 dan direvisi munculah UU Nomor 23 tahun 2014 yang menekankan pelaksanaan otonomi daerah sehingga seluruh aktifitas dan regulasi penyuluhan pertanian ada di puncak kepala daerah sehingga munculah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (PERDA).

Selanjutnya Anang (2014), menyatakan bahwa UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang bertujuan untuk mengefisienkan dan mengaktifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka secara tidak langsung akan membawa perubahan di berbagai aspek. Perubahan itu mulai dari sistem kinerja pemerintahan daerah, dari tingkat pemimpin tertinggi di daerah seperti gubernur, bupati, walikota, camat, lurah sampai dengan tingkat kepala desa. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pertimbangan dilahirkannya UU Nomor 23 tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berlandaskan otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan daya saing daerah. Akan tetapi di lain sisi dengan adanya otonomi daerah semua tanggung jawab menjadi bagian tanggung jawab pemerintah daerah tidak terkecuali penyuluh pertanian. Akibatnya semua institusi yang berwenang dan bertanggung jawab mengenai penyuluh dan kegiatan penyuluh semakin tidak jelas dan ngambang karena berbagai kebijakan dan semua aturan kembali ke pemerintah daerah. Maka munculah PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Sipil dan PERMENTAN Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian, keduanya yang mengatur tata cara pengangkatan, perpindahan, mutasi dan pemberhentian PNS dalam jabatan fungsional.

Dengan adanya otonomi daerah dan adanya PERMENTAN Nomor 09 Tahun 2017 inilah yang mendorong penyuluh-penyuluh senior yang mempunyai pengalaman diambil oleh atasan dan diangkat menjadi pejabat struktural. Sedangkan untuk Penyuluh Pertanian yang menjabat fungsional banyak yang beralih profesi ke bidang-bidang lainnya, baik di Dinas Pertanian maupun ke dinas-dinas lainnya.. Sedangkan Penyuluh Pertanian lainnya banyak yang menjabat tidak sesuai porsi dan keahlian yang dimiliki sehingga status penyuluh banyak yang tidak jelas serta sistem pengangkatan dan peremajaan penyuluh tidak ada, sehingga dengan kondisi seperti inilah banyak penyuluh yang mengundurkan diri secara resmi dan mencari jabatan lain sesuai keahlian.

Propinsi Sumatera Selatan adalah propinsi yang ada di Pulau Sumatera bagian selatan. Luas wilayah Sumatera Selatan 87.017.41 km², dengan 13 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota, dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi Kabupaten terluas 16.905.32 Ha. Kabupaten Banyuasin adalah kabupaten yang ada di propinsi Sumatera bagian Selatan dan kabupaten Banyuasin ini adalah Kabupaten Pemekaran dari kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan UU. Nomor 6 Tahun 2006. Kabupaten banyuasin adalah Kabupaten yang menerapkan UU Nomor 16 tahun 2006 bahwa penyuluh merupakan profesi dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Nomer 43

Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), SKKNI sebagai Acuan dalam Sertifikasi Profesi Penyuluhan Pertanian. Luas wilayah kabupaten Banyuasin 11.832.69 Km², dengan 19 kecamatan dan kelurahan 305 desa. Kecamatan dengan luas paling besar adalah Banyuasin II dengan luas 3.632.40 atau sekitar 30,70% dan wilayah paling kecil adalah Sumber Marga Telang 74,89 atau sekitar 1,48% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin (Banyuasin dalam angka, 2017).

Tabel1. Rekapitulasi Database Kelembagaan Tani dan Penyuluhan Badan Pelaksanaan Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Banyuasin Desember 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah KORLAP	Jumlah PP	Jumlah PP Swadaya	Jumlah Pos Luhdes	Jumlah Gapoktan	Jumlah Klp Tani
1	Banyuasin II	17	1	5	17	16	15	249
2	Pulau Rimau	29	1	17	29	9	29	462
3	Tungkal ilir	14	1	6	12	14	14	217
4	Betung	11	1	5	4	4	8	163
5	Rantau Bayur	21	1	8	23	15	21	185
6	Banyuasin III	26	1	8	21	24	24	294
7	Talang Kelapa	12	—	9	12	8	11	119
8	Tanjung Lago	15	1	9	15	15	15	206
9	Muara Telang	16	1	7	16	16	16	409
10	Makarti Jaya	12	1	8	23	12	12	257
11	Muara Padang	15	3	4	26	15	15	255

12	Muara Sugihan	22	2	5	20	20	20	376
13	Air Salek	14	1	11	15	14	14	357
14	Banyuasin I	13	1	7	13	10	13	168
15	Rambutan	19	1	11	19	18	19	236
16	Suak Tapeh	11	1	8	4	7	11	109
17	Sembawa	11	1	6	9	8	9	106
18	S.M. Telang	10	—	7	5	10	10	264
19	Air Kumbang	16	1	8	14	16	16	166
20	KJF	—	—	2	—	—	—	—
Total Th 2016		304	20	151	297	251	292	4.598

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, 2016

Dilihat dari Tabel 1 Kabupaten Banyuasin memiliki 151 Penyuluh Pertanian, 20 Korlap (Koordinator lapangan) dan 2 Penyuluh Pertanian jabatan fungsional (KJF) dari 304 kelurahan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Akan tetapi jumlah Penyuluh Pertanian tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Banyuasin sehingga dengan jumlah yang kurang ideal dimana 1 Penyuluh Pertanian yang memegang 5 desa dan yang paling sedikit adalah 1 penyuluh memegang 2 desa. Sesuai dengan UU nomer 19 tahun 2013 satu penyuluh satu desa. Sehingga penyuluh kewalahan dalam mengoptimalkan kinerjanya untuk petani Kab Banyusin.

Pendidikan profesi bagi aparat Penyuluh Pertanian sangat dimungkinkan diselenggarakan Profesi Penyuluh Pertanian, dimungkinkan setelah terbitnya UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K) sebagai payung hukum penyuluhan pertanian. Dengan memperhatikan keadaan penyuluh yang memprihatinkan maka terbitlah UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (SP3K) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 juni 2006. UU No. 16 tahun 2006 ini sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan pertanian yang berkelanjutan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian .

Penyelenggaraan aktifitas Penyuluhan Pertanian dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar produksi dan produktivitas pertanian dapat terus meningkat dan mampu bersaing dengan Negara lain. Untuk itulah pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 pasal 32 yang menyatakan bahwa Penyuluh Pertanian selain sebagai pejabat fungsional adalah juga merupakan profesi. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian sangat diperlukan karena Kementerian Pertanian merupakan instansi pembina, sehingga sangat berkepentingan dalam penjaminan standar profesionalisme kinerja pejabat fungsional Penyuluh Pertanian. Karena dulu sebelum adanya UU No. 16 tahun 2006 kebijakan dan perhatian pemerintah sangan kurang untuk Penyuluh Pertanian.

Lebih lanjut Bell (1997), Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat.

Alih profesi Penyuluh Pertanian ditandai dengan berbagai permasalahan yang terjadi di bidang pertanian. Permasalahan alih profesi ini juga ditandai dengan adanya PERMENTAN Nomor 11 Tahun 2017 mulai bermuncunya kesenjangan kebijakan jabatan struktural dan jabatan fungsional, banyak juga yang dipaksa oleh atasan mau tidak mau yang bersangkutan harus menuruti aturan

atasan dan pada akhirnya ada yang menyetujui aturan. dikarenakan tunjangan fungsional lebih besar dari pada tunjangan struktural dan ditambah lagi jabatan fungsional mendapat berupa Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) Sehingga dengan keadaan ini Penyuluh Pertanian hanya bersisa seberapa gelintir yang bertahan karena banyak yang berfikir siapa tahu ada kebijakan dan peraturan baru dari pemerintah yang mampu mengangkat citra Penyuluh Pertanian dan hasil kerja kerasnya mampu membiayai hidup keluarganya.

Fenomena lain yang peneliti temui di lapangan saat mewancarai dari berbagai narasumber, penyebab dari beralihnya profesi juga dikarenakan kemauan sendiri dari penyuluh lapangannya yang merasa honor saat menjadi penyuluh lapangan sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehingga banyak sekali diantara mereka yang mencari pekerjaan lain. Beralih dari sebab dorongan kemauan sendiri beralih profesi, ternyata ada alasan lain yang ditemukan yaitu banyak sekali Penyuluh Pertanian yang kurang dan tidak menguasai dan memahami ilmu-ilmu di bidang pertanian sehingga ketika terjun di lapangan menghadapi para petani mereka kurang mengerti dan kurang bahan saat memberikan sosialisasi ke petani, jadi banyak diantara mereka yang mundur secara perlahan karena tekanan pertanyaan dari para petani yang tidak bisa di jawab.

Dari berbagai alasan dan sebab adanya fenomena yang terjadi di lapangan menyebabkan kursi Penyuluh Pertanian banyak yang tidak terisi, padahal bidang pertanian masih banyak membutuhkan tenaga penyuluh lapangan. Sehingga dengan keadaan yang semakin tidak terkendali ini maka jabatan Penyuluh Pertanian banyak yang tidak memiliki status (tidak jelas). Dengan adanya fenomena ini menyebabkan banyak Penyuluh Pertanian yang beralih profesi, sehingga karier penyuluh pertanian pun banyak yang berubah ke bidang lain. Aktifitas penyuluhan di wilayah banyuasin pun semakin tidak terkondisikan.

Maka dari itu perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai alasan dan dampak yang terjadi akibat dari fenomena alih profesi terhadap aktifitas

penyuluhan yang terjadi di wilayah kabupaten banyuasin. Sehingga dengan banyaknya fenomena alih profesi yang terjadi banyak dari kegiatan rutin yang biasa dilakukan penyuluh pertanian dalam menyampaikan materi dan informasi penyuluhan kepada petani pun jarang bahkan tidak ada sama sekali. Dengan keadaan yang seperti ini aktifitas penyuluhan pun terhambat karena kurangnya personil penyuluh pertanian yang membina petani pada suatu wilayah. Dengan keadaan yang semakin tidak terkondisikan ini banyak penyuluh lapangan yang tidak berminat ke jabatan fungsional, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mampu memanfaatkan keadaan dengan memiliki koneksi yang kuat dan mampu melobi sehingga banyak diantara mereka yang memutuskan beralih profesi. Alih profesinya pun beragam, ada yang terjun ke dunia pemerintahan di kabupaten, ke instansi-instansi kedinasan, di kecamatan dan bahkan ada yang menjabat menjadi perangkat desa. Berdasarkan survey awal yang sudah dilakukan dilapangan dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Fenomena Penyuluh Pertanian Beralih Profesi (Study Kasus Di Wilayah Kabupaten Banyuasin**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti peneliti adalah :

1. Apa alasan Penyuluh Pertanian beralih profesi di wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apa dampak alih profesi Penyuluh Pertanian terhadap aktifitas Penyuluhan Pertanian di wilayah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan beralih profesi penyuluh pertanian di wilayah kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui dampak alih profesi Penyuluh Pertanian terhadap aktifitas penyuluhan pertanian di wilayah kabupaten banyuasin di kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari suatu proses belajar yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan kedepannya.
3. Bagi peneliti lain, sebagai landasan dan bahan informasi untuk penelitian yang sejenis, serta dapat pula sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian serupa dalam lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbal, Muhammad. 2016. Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jumlah XI Nomor 2, Oktober 2016. Diambil dari : <https://www.google.co.id/search?q=Jurnal+Harmonisasi+Kewenangan+Antara+Pemerintah+Pusat+Dan+Daerah+Dalam+Penyelenggaraan+Otonomi+Daerah.Pdf&Oq=Jurnal+Harmonisasi+Kewenangan+Antara+Pemerintah+Pusat+Dan+Daerah+Dalam+Penyelenggaraan+Otonomi+Daerah.Pdf&Aqs=Chrome..69i57.50105j0j7&Sourceid=Chrome&Ie=UTF-8> (17 maret 2018)
- Anang, Rahidin. 2014. Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Menimplementasikan UU Nomor Tahun 2004 (Study Kasus Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan). Disertasi ilmu komunikasi program pasca sarjana universitas padjajaran bandung (tidak dipublikasikan).
- _____. 1995. Study Sistem Latihan Dan Kunjungan (LAKU) Dalam Penyuluhan Pertanian Di WKBPP Tugumulyo (Study Kasus Di BPP Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan). Tesis Program Study Ekonomi Pertanian Jurusan Ilmu-Ilmu Pertanian Proram Pasca Sarjana Universitas Brawijaya (tidak dipublikasikan).
- Andrianto, Tuhana Taufik. 2014. Pengantar Ilmu Pertanian Agraris, Agrobisnis, Agroindustri Dan Agroteknologi. Global Pustaka Umum. Yogyakarta.
- Anies. (2005). Penyakit akibat kerja. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin. 2016. Profil Potensi Kabupaten Banyuasin. Palembang
- Badan pusat statistik. 2017. Banyuasin dalam angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. Banyuasin. https://banyuasin.kab.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Kabupaten-Banyuasin-Dalam-Anka-Tahun-2017.Pdf. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2017
- Bahua Muhammad Ikbal. 2016. Kinerja Penyuluh Pertanian. Deepublish. Yogyakarta.
- Bianca, A., Putiri B. Katili, Shanti K., dan Anggraeni. 2013. Pengaruh Motivasi, Pengembangan Karir, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Metode Structural Equation Modelling. *Jurnal Teknik Industri*, 1(4), h: 334340. (Diakses pada tanggal 7 Desember 2018)

- Dinas pertanian kabupaten banyuasin. 2016. Rekapitulasi Database Kelembagaan Tani Dan Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Banyuasin Desember 2016. Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin. Banyuasin.
- Endriani, Mellytia Ayukristi. 2015. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Niat Alih Profesi Wanita Pekerja Seks (Wps) Di Resosialisasi Rowosari Semarang. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Diponegoro (<http://eprints.undip.ac.id/52741/1/5459.pdf>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2018).
- Harijati, Sri. Dkk. 2006. PRA (Participatory Rural Apriasal) Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta
- Hariyanti, Sri Hajar. 2016. Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Pengambilan Keputusan Alih Profesi Dari Karyawan Ke Driver Ojek Online. Fakultas Psikologi Program Study Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. (https://www.google.co.id/search?ei=6G_sWt-4F46gvQStq5iIBQ&q=skripsi+Sri+Hajar+hariyanti.+2016+Hubungan+Antara+Motivasi+Kerja+Dengan+Pengambilan+Keputusan+Alih+Profesi+Dari+Karyawan+Ke+Driver+Ojek+Online.&oq=skripsi+Sri+Hajar+hariyanti.+2016+Hubungan+Antara+Motivasi+Kerja+Dengan+Pengambilan+Keputusan+Alih+Profesi+Dari+Karyawan+Ke+Driver+Ojek+Online.&gs. Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2018).
- Hasibuan, MSP. 2009. Manajemen Sumberdaya Manusia. Ikrar Mandiri Abadi. Jakarta.
- Idrus, M. (2009). Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama
- Kartasapoetra, A.G. 1993. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
- Kartasapoetra, A.G. 1994. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
- Koesoema, Albertus Doni. 2012. Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh. Yogyakarta: Kanisius.
- Machmur, Mulyono. 2009. Pedoman Umum Penyelenggaraan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Tahun 2009. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian 2009.

- Manoppo, Victoria Era Nicoline. 2013. Mobilitas dan Alih Status Nelayan Skala cil di Provinsi Sulawesi Utara. Institut Pertanian Bogor. (<http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/63669/1/2013ven.pdf> Diakses pada tanggal 14 Februari 2018).
- Mayrowani Henny. 2006. Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perdagangan Hasil Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian. 4 (4) Desember 2006. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Oentarto Sindung Mawardi, et.all. 2004. Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan. Samitra Media Utama. Jakarta, Indonesia.
- Padmowiharjo, S. 2003. Penyuluhan Sebagai Pilar Akselerasi Pembangunan Pertanian Di Indonesia Pada Masa Mendatang. IPB Press. Bogor, Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Permentan Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian.
- Purba, May Pratiwi. 2015. Alih Profesi Buruh Pabrik Menjadi Tukang Becak Sebagai Upaya Meningkatkan Penghasilan (Studi Pada Penarik Becak di Desa Sigara gara Kec. Patumbak). Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik Universitas Sumatera Utara. Medan. ([http://bba.telkomuniversity.ac.id/id/capstone-database/skripsi-mahasiswa-tahun-2015/Diakses pada tanggal 12 Februari 2018](http://bba.telkomuniversity.ac.id/id/capstone-database/skripsi-mahasiswa-tahun-2015/Diakses%20pada%20tanggal%2012%20Februari%202018)).
- R. Wayne Mondy. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Erlangga. Jakarta.
- Regina, G. K. 2013. Pengembangan Karir dan *Self-Efficacy* Terhadap KinerjaKaryawan Pada PT. Matahari Department Store Manado Town Square. *JurnalEMBA*, 1(4), h: 906-916. (Dikases pada tanggal 7 Desember 2018).
- Setiana L. 2005.Teknik penyuluhan dan pemberdayaan. Ghalia indah. Bogor, Indonesia.
- Setyowati, Hari. 2013. Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Guru Sekolah Dasar Menurut Peraturan Bersama 5 Menteri Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses pada tanggal 14 Februari 2018.

- Sjafri Mangkuprawira dan Aida Vitayala Hubeis. 2007. Manajemen Mutu Sumber Data Manusia. Ghalia. Ciawi Bogor. Indonesia.
- Slamet Margono. 2001. Menata Sistem Penyuluhan Pertanian Di Era Otonomi Daerah. Program Studi Ilmu Penyuluhan Pertanian IPB. Bogor.
- Slamet Margono. 2003. Pemberdayaan masyarakat dalam membentuk pola perilaku manusia pembangunan. IPB Press. Bogor.
- Sukino. 2014. Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani. Pustaka Baru. Yogyakarta, Indonesia.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. Alfabeta. Bandung, Indonesia.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung, Indonesia.
- Suhardiyono. 1989. Penyuluhan Pertanian. Pustaka Baru Press. Yogyakarta, Indonesia.
- Suyanto, Kasihani K.E. 2007. English for Young Learners. Bumi Aksara. Jakarta
- Totok Mardikanto. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
- Van Den Ban Dan Hawkins. 1999. Penyuluh Pertanian. Kanisius. Yogyakarta Indonesia.
- Warsito, 2001. Hukum Pajak, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada
- Wirartha, I.M. 2005. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Andi. Yogyakarta.